



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI

UNIT KERJA : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KETUT WICA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 710168

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	255.246.000
1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 90.246.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	142.000.000
1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA X-TRAIL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
5. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	148.136.295



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 560.882.295

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 560.882.295

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.